

DPRD NGAWI GELAR PARIPURNA JAWABAN BUPATI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUBAHAN APBD 2026



Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Dr. H. Yuwono Kartiko, S.E., M.M.



DPRD NGAWI GELAR PARIPURNA JAWABAN
BUPATI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERUBAHAN APBD 2026

NGAWI, DPRD Ngawi Gelar Paripurna Jawaban Bupati dan Pengambilan Keputusan Perubahan APBD 2026. DPRD Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dr. H. Yuwono Kartiko, S.E., M.M., dan menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini mencerminkan pelaksanaan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rapat tersebut, jajaran DPRD Kabupaten Ngawi bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi membahas sejumlah hal berkaitan dengan arah kebijakan perubahan APBD. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan penting untuk memberikan penjelasan sekaligus menanggapi berbagai masukan, pertanyaan, serta catatan yang sebelumnya disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Pandangan umum fraksi merupakan bentuk penyampaian sikap dan perhatian DPRD terhadap rancangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah. Melalui forum tersebut, setiap fraksi dapat menyampaikan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, efektivitas program pembangunan, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Jawaban Bupati kemudian menjadi bahan bagi DPRD dalam mencermati kembali substansi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026. Berbagai tanggapan yang disampaikan diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah yang mengalami perubahan dalam APBD tahun berjalan.

Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Dr. H. Yuwono Kartiko menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran yang disepakati bersama pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. "Pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menyangkut program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat," demikian pokok perhatian dalam pembahasan tersebut. Setelah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, rapat dilanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

Tahapan pengambilan keputusan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ngawi, diharapkan perubahan APBD dapat mengakomodasi perkembangan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2026. DPRD Kabupaten Ngawi juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran. Setiap program yang memperoleh dukungan anggaran diharapkan benar-benar memiliki manfaat dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah maupun dinamika pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, proses pembahasannya membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Rapat paripurna tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Hubungan kemitraan antara kedua lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah. Ketua DPRD Ngawi Dr. H. Yuwono Kartiko bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD terus mendorong agar proses pembahasan anggaran dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan APBD nantinya tetap mengacu pada keputusan yang telah disepakati bersama.

Dengan dilaksanakannya rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026, diharapkan proses penetapan perubahan APBD dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Keputusan tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngawi. Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi salah satu tahapan strategis dalam perjalanan pembahasan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026. (KURNIA/ADV)